

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penerapan Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Nusa Tenggara Timur

Oleh
Rizky Welhelmus Bolla
NIM: 22310132

Penerapan Pidana Tambahan berupa uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan instrumen penting untuk memastikan pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif. Selain pidana penjara, pembayaran uang pengganti berfungsi sebagai mekanisme pemulihan (*recovery*) agar negara memperoleh kembali aset yang telah dirugikan oleh pelaku. Namun dalam praktiknya, penerapan uang pengganti sering kali menghadapi berbagai kendala, baik terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana maupun pelaksanaan eksekusinya oleh jaksa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi di nusa tenggara timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin, serta bahan hukum tersier yang kemudian dianalisa secara normatif kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uang pengganti didasarkan pada aspek yuridis yakni berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 J.o Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Kedua*, dari aspek faktual pertimbangan hakim dipengaruhi oleh peran terdakwa, fakta persidangan serta besaran kerugian keuangan negara yang terbukti. *Ketiga*, Secara filosofis pidana uang pengganti dimaksudkan sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan korupsi. *Keempat*, penerapan asas proporsionalitas dalam pertimbangan hakim menentukan besaran uang pengganti sesuai dengan tingkat kesalahan, peran dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. *Kelima*, Validitas perhitungan ahli yang menjadi acuan awal hakim dalam menentukan besaran penjatuhan pidana berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Pertimbangan Hakim, Nusa Tenggara Timu

ABSTRACT

Description Of The Implementation Of Replacement Money For Perpetrators Of Corruption Crimes In East Nusa Tenggara

By
Rizky Welhelmus Bolla
Student ID: 22310132

The application of additional penalties in the form of compensation payments in corruption crimes is an important instrument to ensure the effective recovery of state financial losses. In addition to imprisonment, compensation payments function as a recovery mechanism to restore state assets that have been harmed by the perpetrator. However, in practice, the application of compensation often encounters various obstacles, both related to the judge's considerations in imposing the penalty and its execution by the prosecutor. The core problem examined in this research is the basis of judge's consideration in imposing additional penalties in the form of compensation payments on perpetrators of corruption crimes and their actual implementation. The purpose of this research is to determine and analyze the judge's considerations payments in the practice of corruption law enforcement in east nusa tenggara. The research method used is normative legal research with a descriptive approach. The data were collected through secondary legal materials such as literature and doctrine, as well as tertiary legal materials, and then analyzed normatively and qualitatively.

The results of the study show that: First, the basis for the judge's consideration in imposing replacement money is based on the legal aspect, namely based on the provisions of Article 18 of Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. Second, from the factual aspect, the judge's consideration is influenced by the role of the defendant, the facts of the trial and the amount of state financial losses that are proven. Third, philosophically, the replacement money sentence is intended as an instrument for recovering state financial losses resulting from corruption. Fourth, the application of the principle of proportionality in the judge's consideration determines the amount of replacement money according to the level of error, role and how much loss is caused. Fifth, the validity of expert calculations which are the initial reference for the judge in determining the amount of the sentence in the form of replacement money for perpetrators of corruption.

Keywords: *Compensation Payment, Corruption Crime, Judge's Consideration, East Nusa Tenggara*